



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : UIK TJB

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HARI CAHYONO**
2. Jabatan : **GENERAL MANAGER**
3. NHK : **424129**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.560.162.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 158 m2/173 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah Seluas 86 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 60.372.000
3. Tanah Seluas 145 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 101.790.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 61 m2/61 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 40 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/107 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 35 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 448.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 1.034.500.000**

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. LAINNYA, SEPEDA POLYGON Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000



3. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
510.000.000
4. MOBIL, TOYOTA COROLLA CROSS Tahun 2021, LAINNYA Rp.
470.000.000
5. MOTOR, VESPA SPRINT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
42.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	391.550.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	645.678.161
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	6.631.890.161
III. HUTANG	Rp.	767.118.171
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.864.771.990

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.